

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adjie, Habib, 2008, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- , 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama.
- , 2012, *Bernas-bernas pemikiran dibidang Notaris dan PPAT*, Bandung, Bandar Maju.
- Anshori Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Bachrudin H, H, Gunarto, H. Eko Soponyono, 2019, *Hukum Kenotariatan; Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Refika Aditama, Bandung.
- Djati Julitriarsa dan John Suprihartono, *Manajemen Umum*, Jakarta, BPFE, 1998, hlm. 101.
- Hadi, Sutrisno, 1998, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2009, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat cetakan ke II*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia; dulu, sekarang, dan di masa dating*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Soemitro, Ronny, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Simorangkir, Johannes, 2013, *Kamus Hukum Cetakan: 15*, Sinar Grafika,  
Jakarta.

Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar , 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat  
Akta Tanah (Panduan praktis dan mudah taat hukum)*, Mitra Wacana  
Media, Jakarta.

Syaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan  
Akta*, Mandar Maju, Jakarta.

Tobing, GHS Lumban 1999, *Peraturan Jabatan Notaris Cet. 5*, Airlangga,  
Jakarta.

Waluyo, Bambang 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika,  
Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia nomor 5491.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor:

M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas  
Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,  
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis  
Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian  
anggota, dan tata kerja Majelis Pengawas. Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 nomor 1787

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor

16 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan  
dan pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris. Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 211

Perubahan kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang  
diselenggarakan di Banten tanggal 29-30 Mei 2015

### **C. Tesis**

Yustitiani, Resty Dhany, 2018, "Pengawasan dan pembinaan Notaris oleh  
Majelis Pengawas daerah (MPD) gabungan di kabupaten Jayawijaya",  
*Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Anggraeni, Isma Faradiba, 2017, “Pembinaan dan pengawasan Notaris diwilayah kabupaten Pangandaran”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Asina Tabaluman, 2009, “Praktik pengawasan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris di Provinsi Maluku”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### C. Internet

Notoadmodjo, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>, diakses pada Kamis 27 Agustus 2019 pukul 13.00 WITA

<https://sulut.bpk.go.id/pemerintah-kabupaten-minahasa>, diakses pada 30 April 2021 pukul 18.30 WITA